



REGULATORY CAPITALISM DI ASIA TENGGARA: TRANSFORMASI DAN PERAN KAPITAL INTERNASIONAL DALAM RESTRUKTURISASI NEGARA

Faris Al-Fadhat^{1*}

¹Department of International Relations; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Indonesia

*email: farisalfadh@umy.ac.id

Abstract

This article investigates the role of international capital in state restructuring and the emergence of regulatory capitalism in Southeast Asia. It explores economic expansion that is regulated and conditioned by power dynamics between capitalist factions and states, using a qualitative research approach and literature review methods. The focus is on the relationship between the bourgeoisie and the state, illustrated by case studies from Singapore, Indonesia, and Malaysia. The paper reveals the significant role of a globally-oriented bourgeoisie faction, underscored by cross-border mergers, acquisitions, and joint ventures within the region in the past two decades. It asserts that the rise of the international bourgeoisie has triggered demand for regulation, pressuring Southeast Asian governments to transform. The state model is shifting from a developmental to a regulatory orientation with an international aspect. This restructuring enables the state to actively foster global capital expansion in the regional market through various regulations and negotiations.

Keywords: *international fractions of capital; internationalization of capital; regulatory capitalism; Southeast Asia; state restructuring*

Abstrak

Artikel ini menganalisis transformasi dan peran kapital internasional dalam restrukturisasi negara dan munculnya regulatory capitalism di Asia Tenggara. Penelitian ini mengeksplorasi akumulasi ekspansi ekonomi yang diatur dan dikondisikan melalui hubungan kekuasaan antara kelas kapitalis dan negara menggunakan metode kualitatif dan tinjauan literatur. Fokusnya adalah pada hubungan antara kaum borjuis dan negara, yang diilustrasikan melalui studi kasus tiga negara yaitu Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Hasil penelitian ini mengungkapkan peran penting dari faksi borjuasi yang berorientasi global, yang ditandai oleh merger, akuisisi, dan usaha patungan antarkorporasi besar lintas batas di kawasan ini dalam dua dekade terakhir. Secara spesifik, penelitian ini berargumen bahwa kebangkitan borjuasi internasional telah memicu tuntutan akan regulasi, menekan pemerintah Asia Tenggara untuk berubah. Model negara bergeser dari orientasi pembangunan ke regulasi dengan aspek internasional. Restrukturisasi ini memungkinkan negara untuk secara aktif memfasilitasi internasionalisasi kapital di pasar regional melalui berbagai regulasi dan negosiasi.

Kata Kunci: *Asia Tenggara; fraksi kapital internasional; internasionalisasi kapital; regulatory capitalism; restrukturisasi negara*

Pendahuluan

Negara memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi politik di Asia Tenggara, yang dalam tiga dekade terakhir mengalami transformasi sebagai kawasan paling menjanjikan dalam hal pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keamanan (Carroll et al., 2020). Dalam menjelaskan hal ini, beberapa studi literatur seperti Hill (2002), Leung & Chan (2002), serta Sato (2019) merujuk pada konsep “negara pembangunan” (*developmental states*), yang melihat peran negara terpisah dari kekuatan sosial domestik dan secara mandiri mengarahkan kebijakan ekonomi Asia Tenggara. Sebaliknya, artikel ini menawarkan pendekatan yang berbeda, di mana pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dilihat sebagai proses di mana negara dan kekuatan-kekuatan sosial saling memengaruhi dan membentuk satu sama lain. Hubungan utamanya adalah antara negara dan kelas kapitalis diantaranya yaitu kelompok borjuasi, konglomerat, korporasi besar, *cukong*. Pada kurun Perang Dingin, kelas-kelas kapitalis di Asia Tenggara terbilang lemah, bergantung kepada rezim otoriter untuk menindas partai politik sayap kiri dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi berkembangnya ekonomi mereka (Carroll, 2020). Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan munculnya jejaring yang sangat kuat antara para elit bisnis dan politik, disertai dengan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan kronisme yang merajalela menandai kemunculan kelas-kelas kapitalis baru di kawasan (Hewison, 1989; Robison, 1986; Rodan, 1989). Konsolidasi negara, dengan demikian, berjalan beriringan dengan konsolidasi kelas-kelas kapitalis nasional.

Namun demikian, dengan semakin terintegrasinya ekonomi negara-negara Asia Tenggara ke dalam ekonomi politik global khususnya setelah krisis ekonomi 1998, diskursus dan penelitian mengenai hubungan negara-kapital menemukan signifikansinya. Pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang pesat dicapai hanya melalui liberalisasi ekonomi nasional secara selektif ke dalam investasi internasional, menghubungkan kawasan ke dalam jaringan produksi dan perdagangan transnasional (Carroll, 2020). Di saat beberapa fraksi kelas kapitalis nasional masih berkepentingan untuk memproteksi pasar domestik dari kecenderungan integrasi global, fraksi-fraksi kapital yang lain semakin mengejar strategi internasional untuk akumulasi modal. Hal ini diwujudkan melalui aktivitas lintas negara dari para konglomerat, terutama strategi merger, akuisisi, dan usaha patungan (*joint venture*). Menurut Laporan Investasi ASEAN 2019, ekspansi kapitalis lintas batas menjadi salah satu indikator paling penting dari pembangunan

ekonomi kawasan pada beberapa tahun terakhir. Nilai total merger dan akuisisi di kawasan meningkat dari US\$ 825 juta pada tahun 2017 menjadi US\$ 992 juta pada tahun 2018 (ASEAN, 2019: 30-31). Hal ini menandakan kemunculan fraksi kapital yang mengalami terinternasionalisasi di kawasan Asia Tenggara (Al-Fadhat, 2019).

Artikel ini mengkaji kemunculan fraksi kapital internasional dalam dua dekade terakhir serta peran mereka dalam restrukturisasi negara di kawasan Asia Tenggara. Fraksi kapital internasional di sini merujuk pada kelas kapitalis yang diasosiasikan dengan konglomerat, kelompok bisnis, dan borjuasi, yang telah mengalami transformasi. Dari sebelumnya yang berorientasi akumulasi kapital di pasar dalam negeri menuju ekspansi lintas negara atau yang juga disebut dengan proses internasionalisasi kapital baik di tingkat global maupun regional (Al-Fadhat, 2022). Bagi fraksi kapital ini, institusi negara yang dulunya berperan sebagai kepompong kini menjadi penghalang bagi ambisi ekspansi bisnis mereka lebih lanjut. Meski demikian, proses pembangunan ekonomi sebelumnya juga telah menyebabkan kelompok kapitalis ini terintegrasi ke dalam jaringan aparatus negara (Rodan et al., 2006). Hal ini memberikan pengaruh kuat bagi transnasionalisasi kelompok kapitalis untuk memajukan dan mengamankan strategi-strategi akumulasi berorientasi internasional mereka dengan mendorong restrukturisasi kekuasaan negara sehingga membentuk pola *regulatory capitalism* (kapitalisme regulasi), yaitu proses akumulasi dan ekspansi ekonomi yang diatur dan dikondisikan melalui hubungan kekuasaan antara fraksi kapital dan negara.

Secara spesifik artikel ini berargumen bahwa ekspansi borjuasi internasional yang dikombinasikan dengan integrasi pada ekonomi politik global telah menghasilkan permintaan regulasi dan perubahan negara di kawasan. Hal ini diwujudkan melalui berkurangnya kebijakan intervensionisme dan model negara pembangunan dan beralih pada model negara peraturan (*regulatory state*), yang memfasilitasi ekspansi konglomerat melintasi batas-batas negara di kawasan melalui berbagai pengaturan dan negosiasi. Selanjutnya, restrukturisasi negara ini memungkinkan adanya peran negara dalam memfasilitasi ekspansi fraksi kapital internasional di pasar kawasan melalui berbagai regulasi dan negosiasi. Hal ini bermula pada tahun 1980-an dengan pengambilan kebijakan industrialisasi berorientasi ekspor (*export-oriented industrialization*) demi memudahkan keterlibatan borjuasi lokal ke dalam ekonomi global, seperti kebijakan penghapusan hambatan bagi arus kapital, barang dan tenaga kerja, untuk menciptakan

pasar yang lebih besar. Dengan demikian, dominasi politik dari fraksi kapital internasional diatur di dalam dan melalui internasionalisasi negara. Argumen ini akan dijelaskan melalui studi kasus tiga negara yaitu Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Ketiga negara ini dipilih sebagai studi kasus karena dapat memberikan gambaran kompleksitas transformasi kapitalisme di Asia Tenggara. Di mana ketiganya menunjukkan rute yang berbeda dalam hubungan bisnis dan politik namun sama-sama mengalami proses ekspansi kapital internasional melalui hubungan yang erat antara kelas kapitalis dengan elit politik melalui kebijakan pemerintah. Perbedaan konteks ekonomi-politik domestik inilah yang menjadi gambaran umum di kawasan Asia Tenggara namun sama-sama mengalami internasionalisasi kapital yang nantinya membentuk pola baru dalam restrukturisasi negara.

Kerangka Konseptual *Regulatory Capitalism*: Relasi Borjuasi Internasional dan Negara

Diskursus mengenai internasionalisasi kapital dan relasi kekuasaan yang terjalin dengan negara dapat dirunut dari dua aliran dalam studi ekonomi politik, yaitu Mazhab Amsterdam (*Amsterdam School of International Political Economy*) dan Mazhab Murdoch (*Murdoch School of Political Economy*). Para peneliti dalam Mazhab Amsterdam seperti Jessop dan Overbeek berpendapat bahwa fraksi kapital internasional (konglomerat yang terinternasionalisasi) menjadi aktor penting dalam ekonomi global kontemporer melalui proses formasi kelas transnasional, yang memberikan kebangkitan bagi aliansi sosio-politik dan pembentukan negara (Jessop & Overbeek, 2019; Overbeek, 2004). Sementara Mazhab Murdoch, yang lebih memokuskan kajian pada transformasi sosial di Asia Tenggara, berpendapat bahwa kelahiran kelas kapitalis yang terdiri dari elit-elit borjuasi dan konglomerat tidak terlepas dari kuatnya aliansi kekuasaan antara fraksi kapital dan elit politik, terutama melalui proteksi dan kebijakan konsesi. Aliansi ini yang membuat akumulasi kekayaan kelas borjuasi dapat terjadi, termasuk ekspansi kapital selanjutnya (Carroll, 2020; Hewison, 2021; Robison, 1986; Rodan et al., 2006). Dengan demikian, berbagai perubahan dalam kebijakan-kebijakan strategis negara yang mendorong ekspansi global dari berbagai sektor bisnis dibentuk melalui aliansi sosial dan politik yang kompleks yang dihasilkan dari meningkatnya orientasi internasional dari kelas borjuasi atau kelompok bisnis.

Perkembangan ini mencerminkan perubahan penting dalam organisasi spasial kapitalisme dan negara. Kunci untuk memahami perubahan ini adalah pengakuan bahwa kapitalisme tidak pernah sepenuhnya sebatas aktivitas “ekonomi”, melainkan selalu menjadi bagian atau melibatkan proses politik. Marx & Engels (1965 [1848]) secara masyhur mencatat bahwa sifat dari kapital (modal) selalu cenderung berkembang melampaui perbatasan-perbatasan wilayah yang ada. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Palloix (1977), ekspansi kapital ke dalam pasar internasional tidak lagi semata-mata fenomena ekonomi murni ketimbang konsolidasi pasar-pasar nasional dan reorganisasi borjuasi nasional. Para pelaku ekonomi pada periode awal melakukan transaksi-transaksi internasional yang penuh risiko menggunakan biaya sendiri, mengembangkan mekanisme asuransi swasta. Namun demikian, perdagangan dan investasi internasional berskala besar membutuhkan infrastruktur pendukung yang diorganisasi oleh negara, baik itu infrastruktur “keras” seperti jalanan, jalur kereta api, dan pelabuhan untuk menghubungkan pasar-pasar jauh, serta pengaturan keamanan untuk menjaga semuanya, ataupun infrastruktur institusional “lunak” seperti perjanjian, undang-undang, dan peraturan-peraturan untuk membantu mengatur interaksi-interaksi ekonomi.

Palloix (1977) lebih lanjut melakukan teorisasi pembangunan kapitalisme global yang dia jelaskan ke dalam tiga “sirkuit” kapital yang saling terkait: sirkuit produktif (produksi komoditas); sirkuit komoditas (penjualan komoditas tersebut); dan sirkuit uang (akumulasi kapital sebagai uang). Masing-masing sirkuit ini membutuhkan infrastruktur pendukung: sebuah rezim politik yang dapat memaksakan warganya untuk menjual tenaga, aturan-aturan hukum yang mengizinkan dan mengatur produksi komoditas dan pertukaran mereka, institusi dan pemeliharaan uang serta sistem finansial, dan seterusnya. Pada masyarakat pra-kapitalis, semua hal ini dapat ditemukan, baik secara parsial ataupun tidak sama sekali. Sirkuit ini harus dihasilkan melalui pelaksanaan kekuasaan, dan kerap kali adalah elit-elit penguasa—pengaturan pada awalnya belum sempurna namun menjadi semakin canggih—yang melakukan fungsi ini. Awalnya pemerintah kota dan monarki terpusat, dan kemudian rezim-rezim yang dikuasai oleh borjuasi-borjuasi baru, membantu menghancurkan relasi sosial feodal yang menghalangi kemunculan buruh upahan, secara paksa menyatukan pasar-pasar lokal, peraturan-peraturan serta berat dan ukuran ke dalam ruang-ruang nasional bagi akumulasi kapital. Kekuatan produktif dan pendapatan pajak yang dilepaskan melalui transformasi-transformasi ini membantu kemunculan negara-

bangsa yang kuat, khususnya di Eropa. Negara-negara ini—dan kemudian organisasi-organisasi internasional—kemudian menjadi aktor utama dalam memberikan infrastruktur yang memungkinkan ekspansi kelas kapitalis melampaui pasar nasional, pada awalnya melalui imperialisme langsung dan, lebih mutakhir lagi, melalui mekanisme yang lebih canggih yang menjadi perhatian dari artikel ini: transnasionalisasi aparatus negara.

Transformasi negara terkait erat dengan kebangkitan fraksi internasional dari kelas kapitalis. Setelah bertahun-tahun akumulasi kapital berada di dalam batas-batas negara, korporasi besar merasa tidak lagi dapat melakukan proses akumulasi kekayaan sebatas di pasar domestik. Konglomerat ini mewakili fraksi kapital yang terus tumbuh—dan juga dominan—dengan operasi bisnis di dalam negeri dan berkelindan dengan dinamika kapitalis global (Tsoukalas, 1999: 59). Kelompok bisnis ini, sembari memiliki kemampuan memproduksi barang di dalam suatu negara, dapat menjual komoditasnya di pasar global dan menginvestasikannya kembali dalam produksi di luar batas negara tempat proses produksi asalnya berlangsung (Glassman, 1999). Karena itu, kelompok bisnis ini tidak lagi secara eksklusif dapat disebut sebagai kapitalis “nasional” melainkan terintegrasi di dalam lingkaran kapital, produksi, dan penciptaan nilai global dan regional. Poulantzas (1978: 57) mengembangkan konsep “borjuasi interior” untuk menunjukkan adanya transformasi dari borjuasi “nasional” menuju kelompok kapitalis dengan relasi politik nasional yang sangat kuat. Sementara basis materialnya terkait dengan sebuah struktur politik nasional, borjuasi internasional juga memiliki ikatan mendalam dengan kapital dan rantai produksi global (*global production chain*), membentuk relasi kuasa transnasional (Wissel, 2006: 218-219). Sebagaimana dicatat oleh Carroll dkk. (2019), fraksi kapital internasional ini muncul melalui konteks struktural yang lebih luas: “formasi intensif dari pasar dunia”, sebuah proses menguatnya globalisasi ekonomi. Dalam konteks ini, baik fraksi kapital dan negara ditekan untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan pasar, dan lebih jauh lagi untuk menguatkan pola-pola relasi kapitalis global.

Semakin besarnya ekspansi fraksi kapital internasional ini di pasar-pasar kawasan dan global sejak 1980-an tidak lantas menyiratkan bahwa negara menjadi semakin kurang penting, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa peneliti yang meyakini konsep “kelas kapitalis transnasional” (Robinson, 2007; Sklair, 2001). Justru sebaliknya, peran dan

posisi negara menjadi semakin penting untuk memastikan proses internasionalisasi borjuasi interior ini dapat berjalan (Poulantzas, 1974). Kapital, dalam hal ini, cenderung berkembang dan bergerak dengan kecepatan yang terus meningkat melintasi batas-batas teritorial negara, dan kemudian tampak bekerja pada skala internasional. Bagaimana pun, produksi dan akumulasi kapital hanya dapat berlangsung di sebuah wilayah yang terikat dan dalam lokasi spesifik. Dan hal ini membutuhkan institusi-institusi nasional untuk mengatur kebijakan-kebijakan ekonomi dan memastikan kelanjutan pemeliharaan kondisi yang menguntungkan bagi akumulasi kapitalis tersebut (Panitch & Gindin, 2004: 17). Dengan demikian, ekspansi global dari fraksi kapital tetap akan terus membutuhkan negara untuk memainkan perannya, yang secara khusus dituntut untuk memudahkan terbentuknya jejaring kapital transnasional, sekaligus sebagai strategi dalam menyelesaikan hambatan/persoalan dalam operasi bisnis mereka di tingkat domestik.

Pola hubungan dan ekspansi ini turut membentuk restrukturisasi negara, yang selanjutnya membentuk sifat dan struktur negara sebagai arena perjuangan politik dalam proses akumulasi kapital (Bieler & Morton, 2014; Glassman, 1999). Transformasi ini melibatkan struktur politik dan ekonomi negara yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam bentuk, keutamaan, dan kepentingan kelompok sosial yang dominan—dalam hal ini adalah kelas kapitalis, khususnya kelompok bisnis yang telah mengalami internasionalisasi. Perubahan peran negara di sini terjadi untuk membantu menghasilkan (kembali) hubungan sosial yang mendukung ekspansi kapitalis yang melampaui batas-batas wilayah, terutama di sebuah kawasan yang terus mengalami integrasi ekonomi (Jessop, 2015; Jones, 1997; MacLeod & Goodwin, 1999). Lebih jauh lagi, proses-proses internasionalisasi semacam itu telah mengarah kepada perluasan persekutuan politik kaum borjuasi melampaui wilayah-wilayah negara melalui jejaring global sekaligus regional melalui aliansi politik dengan aparat negara. Relasi kekuasaan ini mendorong negara menciptakan kondisi bagi proses ekspansi dan akumulasi lebih lanjut melalui berbagai regulasi baik di tingkat nasional maupun kawasan—pola pembangunan ekonomi yang mencerminkan *regulatory capitalism* (Levi-Faur, 2017).

Dalam kerangka *regulatory capitalism* ini, pola akumulasi dan ekspansi ekonomi mengalami pengaturan dan dikondisikan melalui hubungan kekuasaan antara fraksi kapital dan negara. Sehingga dapat memberi keuntungan yang absolut bagi kelas kapitalis yaitu korporasi besar atau konglomerat. Sebagaimana dijelaskan melalui kasus di tiga

negara ASEAN yaitu Singapura, Indonesia, dan Malaysia, bahwa aliansi kekuasaan antara borjuasi dan pemerintah melahirkan berbagai kebijakan, baik di tingkat nasional maupun regional, yang memfasilitasi proses akumulasi dan ekspansi kapital. Dari proses ini, terjadi pergeseran signifikan terhadap konsolidasi kelas kapitalis di Asia Tenggara. Dari sebelumnya konsolidasi borjuasi berorientasi nasional melalui berbagai kebijakan statis negara pada 1970-an dan 1980-an menuju kemunculan fraksi kapital berorientasi internasional, khususnya setelah krisis finansial Asia 1997, serta adanya kemudahan dalam proses ekspansi kapital dalam skala transnasional melalui serangkaian kebijakan negara.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan dan dikategorikan berdasarkan fokus dari setiap masalah penelitian. Adapun data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen resmi dari ASEAN *Secretariat*, laporan kebijakan, laporan tahunan korporasi/perusahaan, jurnal ilmiah, buku, serta berita resmi dari media massa daring. Fakta-fakta yang disajikan dalam penelitian ini didasarkan pada interpretasi menggunakan pendekatan ekonomi politik internasional. Pendekatan penelitian ini mengacu pada pandangan bahwa kegiatan ekonomi bukanlah sesuatu yang netral dan bebas nilai. Pada dasarnya ia adalah bagian dari dan akan selalu dibentuk oleh kepentingan politik dari berbagai aktor politik dan ekonomi yang diperebutkan, yang secara khusus melibatkan aliansi antara aktor dominan seperti fraksi kapital (borjuasi, korporasi, konglomerat) dan negara (Al-Fadhat, 2022; Jessop & Overbeek, 2019; Levi-Faur, 2017). Validasi data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Data yang dinilai valid kemudian dipergunakan untuk mendeskripsikan proses transformasi dan peran dari fraksi kapital internasional di Asia Tenggara dalam membentuk restrukturisasi negara sehingga membentuk pola *regulatory capitalism* di kawasan. Untuk memberikan gambaran atas fenomena yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, penelitian ini menggunakan studi kasus atas tiga negara yaitu Singapura, Indonesia, dan Malaysia—tiga negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan.

Internasionalisasi Kapital, Negara, dan Kapitalisme Kroni

Studi tentang transformasi fraksi kapital di beberapa negara maju, terutama Eropa dan Amerika Serikat, telah dijelaskan oleh Mazhab Amsterdam. Namun demikian, terdapat bukti yang kuat akan munculnya “borjuasi interior” di kawasan Asia Tenggara bersamaan dengan perubahan dan kebangkitan kelas kapitalis yang terafiliasi sangat erat dengan sifat dan kekuasaan negara. Pada bagian ini akan dijelaskan proses internasionalisasi kapital di kawasan Asia Tenggara dan bagaimana ekspansi kapital ini ikut membentuk dan mempengaruhi proses restrukturisasi pemerintahan di tiga negara: Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Pada masing-masing studi kasus, kebangkitan fraksi kapitalis internasional, yang pada awal kemunculannya disuburkan oleh negara sendiri, ikut membentuk proses restrukturisasi negara yang kemudian memfasilitasi akumulasi kapital di kawasan melalui proses regionalisasi. Karakter dan pola dari regionalisasi kapital ini sangat dipengaruhi oleh relasi antara negara dan masyarakat, terutama kekuatan sosial tertentu.

Sebagian besar regionalisasi kapital di kawasan Asia Tenggara ini terjadi sejak krisis moneter Asia tahun 1997/1998. Krisis ekonomi ikut menghantam aliansi/persekutuan politik antara kelompok borjuasi dan aparat negara di negara-negara Asia Tenggara, yang ditunjukkan dengan banyaknya konglomerat yang menghadapi kebangkrutan. Namun demikian, jika menilik ke belakang, kini kita dapat mengamati bahwa banyak yang tidak saja mampu pulih dari krisis dengan cukup cepat melainkan juga, atau barangkali yang lebih penting, memadukan operasi bisnis mereka ke dalam jejaring kapitalis transnasional. Di saat dominasi mereka dalam ekonomi domestik tetap kuat, banyak dari konglomerat ini yang beradaptasi lebih cepat dan memperluas jangkauan bisnis mereka melampaui batas-batas nasional. Hal ini merupakan sebuah manuver bisnis yang baru bagi banyak orang. Meskipun keterlibatan global dari kelompok bisnis ini telah diawali sejak tahun 1980-an dan setelahnya, namun interaksi global tersebut masih sangat terbatas pada penerimaan FDI dan ekspor produk ke pasar luar negeri. Internasionalisasi kapital melalui ekspansi operasi bisnis seperti akuisisi, merger, dan usaha patungan, serta investasi langsung ke negara-negara di kawasan, baru terjadi secara masif pasca krisis moneter Asia tahun 1997.

Regionalisasi kapital ini tampak jelas melalui data investasi asing langsung yang ke luar (*outward foreign direct investment/OFDI*) yang menunjukkan pertumbuhan

signifikan dari tahun ke tahun. Jenis investasi ini memungkinkan konglomerat untuk memperluas dan mendiversifikasi operasi bisnis mereka ke pasar kawasan ASEAN melalui merger, akuisisi, serta pendirian usaha baru bersama. Bagi negara-negara Asia Tenggara yang selama ini merupakan pengimpor modal asing, ekspansi kapital fraksi kapital internasional ini menjadi penting dan strategis. Data OFDI menunjukkan pada kurun dua dekade dari 1999-2020, persediaan OFDI Indonesia yang sebelumnya hanya sebesar US\$ 6,7 miliar meningkat menjadi sekitar US\$ 88,2 miliar. Sementara persediaan OFDI Filipina meningkat dari US\$ 0,9 miliar menjadi US\$ 63,9 miliar. Persediaan OFDI Malaysia mengalami peningkatan drastis, tumbuh dari US\$ 13,8 miliar ke angka US\$ 129,2 miliar (UNCTAD, 2021). Angka-angka ini dimungkinkan lebih besar lagi jika menghitung investasi yang dijalankan oleh beberapa korporasi besar Asia Tenggara yang dilakukan melalui perusahaan induk (*holding company*) yang berada di luar kawasan. Peningkatan persediaan OFDI ini mengikuti tren yang telah dilakukan oleh Singapura jauh hari. Sebagai penyedia investasi asing langsung terbesar kedua di ASEAN setelah Amerika Serikat, Singapura telah mulai memperbesar persediaan OFDI sejak 1980-an awal untuk memungkinkan ekspansi BUMN di kawasan dan pasar global. Pada tahun 1983, persediaan OFDI Singapura telah menyumbang US\$ 1,0 miliar yang kemudian meningkat pesat menjadi US\$ 1,2 triliun pada tahun 2020 (UNCTAD, 2021).

Dalam konteks ini, kebijakan neoliberal menjadi penting dalam menyesuaikan bentuk pengaturan dari aktivitas-aktivitas ekonomi yang muncul secara transnasional. Secara sepihak, pemerintah Asia Tenggara telah merestrukturisasi negara-negara pada level nasional untuk memudahkan peningkatan arus investasi, produksi, dan perdagangan. Pemerintah juga semakin mencoba menyelaraskan peraturan-peraturan mereka yang dapat melintasi batas-batas kedaulatan nasional. Hal ini telah memberikan kebangkitan kepada upaya-upaya informal dan formal untuk mengintegrasikan pasar lintas batas negara, termasuk pada skala di kawasan. Kemajuan bisa jadi dapat dibatasi oleh persaingan antara fraksi-fraksi kapital: antara fraksi kapital internasionalisasi yang mengutamakan keuntungan, dan fraksi kapital “nasional” yang bisa jadi akan dirugikan oleh kebijakan liberalisasi pasar; dan antara fraksi-fraksi kapital internasional sendiri yang bersaing atas konteks nasional yang berbeda. Dalam hal ini, kontestasi antar fraksi-fraksi kapital ikut membentuk transformasi negara dan juga praktik kebijakan

institusi/pengaturan kawasan. Bagian berikut ini akan menjelaskan studi kasus di tiga negara Asia Tenggara.

Singapura: Negara Kapital dan Internasionalisasi GLCs

Kasus Singapura menggambarkan bagaimana internasionalisasi kapital difasilitasi dan didukung oleh kebijakan strategis negara, dan pada gilirannya ikut membentuk proses restrukturisasi negara. Dalam hal ini, kohesi antara negara dan kapital, yang disokong melalui formasi institusi-institusi politik dan berbagai kebijakan pemerintah, telah membentuk regulasi ekonomi dan politik di Singapura yang bercorak tidak liberal maupun demokratis. Melainkan aliansi ini semakin memperkuat strategi globalisasi dari akumulasi kapital melalui sistem kapitalisme negara. Di Singapura, proses internasionalisasi kapital didominasi oleh perusahaan milik atau terafiliasi dengan negara (*government-linked companies/GLC*), di mana proses transnasionalisasi tersebut telah dimulai secara masif sejak tahun 1980-an.

Sistem kapitalisme negara Singapura mengakar pada strategi partai penguasa yaitu Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party/PAP*), yang telah memerintah Singapura sejak tahun 1959. PAP memiliki hubungan yang tidak menyenangkan dengan pengusaha domestik, karena meragukan kesetiaan politik dan kemampuan mereka dalam mendorong industrialisasi Singapura. Karena itu, rezim PAP sejak awal mendorong kebijakan pembangunan ekonomi melalui pengembangan GLC serta menarik sebanyak mungkin investasi asing (kapital internasional). Hal ini diperkuat kembali setelah tahun 1965 ketika, menyusul berpisahnya Singapura dari Malaysia, kemampuan pasar domestik sangat terbatas—hanya empat juta penduduk saat itu—membuat PAP mengadopsi kebijakan industrialisasi berorientasi ekspor (*export-oriented Industrialization/EOI*) (Boswell & Chase-Dunn, 2000; Yahya, 2005). Badan Pembangunan Ekonomi (*Economic Development Board/EDB*), yang dibentuk tahun 1961, menjadi ujung tombak dalam upaya menarik perusahaan multinasional (MNC) untuk menanamkan modalnya di Singapura (Okposin, 1999), sementara pemerintah ikut menyediakan kondisi pendukung seperti infrastruktur fisik, teknis, dan sosial yang diperlukan dalam proses industrialisasi (Huat, 1997; Tremewan, 1994). Alhasil, investasi asing langsung (FDI) meningkat tajam. Sebagai contoh, di sektor manufaktur, FDI meningkat dari S\$ 157 juta pada 1965 menjadi S\$ 995 juta pada 1970, kemudian S\$ 3,1 miliar pada 1974. Pada kurun yang sama, nilai

ekspor manufaktur Singapura melonjak dari S\$ 349 juta menjadi S\$ 1,5 miliar, hingga S\$ 7,8 miliar (Rodan, 2006: 143).

Dalam konteks ini, GLC merupakan inti dari borjuasi interior Singapura. GLC berkembang melalui tiga rute: (i) menjalin kemitraan dengan MNC; (ii) merupakan sempalan dari industri pertahanan; dan (iii) privatisasi atas sektor-sektor publik yang sebelumnya dimonopoli negara (Huat, 2016: 502). Pada tahun 1990-an, GLC yang besar mulai melakukan ekspansi ke pasar internasional yang didukung langsung oleh kebijakan ekonomi luar negeri Singapura, yang memang berupaya memfasilitasi proses internasionalisasi kapital Singapura di seluruh kawasan (Wong & Ng, 1997: 136). Strategi ini erat dipengaruhi oleh hambatan struktural yang dialami Singapura dalam mengembangkan sektor manufakturnya pada pertengahan 1980-an, serta adanya resesi ekonomi global pada kurun waktu yang sama. Selain disebabkan kecilnya pasar domestik, ekspansi GLC di dalam negeri juga mendapat hambatan dengan naiknya upah buruh melalui kebijakan resmi Dewan Upah Nasional (*National Wages Council*) di tahun 1970-an, sehingga mengurangi daya saing barang-barang ekspor Singapura. Guncangan minyak dan resesi global tahun 1970-an, dibarengi dengan peningkatan persaingan dari basis-basis industri manufaktur yang muncul di negara-negara Asia Tenggara lain, ikut menambah persoalan yang dihadapi GLC. Seturut itu, pada pertengahan 1980-an, Komite Ekonomi yang baru dibentuk pemerintahan PAP meluncurkan kebijakan-kebijakan restrukturisasi untuk mengubah ekonomi menuju industri teknologi tinggi, mencoba menarik lebih banyak lagi MNC untuk membuka operasi mereka di Singapura, dan mendesak GLC menanamkan modal di usaha-usaha regional dan global (Asia Times, 2002; Rodan, 2016). Hal ini mendorong banyaknya GLC yang mulai melakukan ekspansi operasi bisnis mereka ke beberapa negara, terutama negara dengan upah buruh yang lebih rendah, seperti kepulauan Riau, Indonesia.

Internasionalisasi negara Singapura ini penting dalam mendukung perluasan bisnis GLC pada level global. EDB dan Badan Pembangunan Perdagangan (*Trade Development Board*)—di kemudian hari diubah menjadi *International Enterprise Singapore* atau *IE Singapore* (dewan hukum di bawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian)—memainkan peran penting dalam mempermudah investasi dan perdagangan luar negeri (IE Singapore, 2016). Sebagai tambahan, pemerintah mendirikan dana kekayaan abadi (*sovereign wealth fund*), *Government of Singapore Investment Corporation* (GIC) pada

tahun 1981 untuk mendukung ekspansi internasional GLC. Pada 1983, GIC memiliki investasi ekstensif di luar negeri berjumlah total S\$ 3 miliar dan melibatkan 58 perusahaan (Rodan, 2006: 144). Pada Maret 2014, GLC terbesar Singapura, Temasek Holdings, mencatatkan portofolio investasi sebesar S\$ 223 miliar (Temasek Holdings, 2014: 6). Menurut *Sovereign Wealth Fund Institute*, pada tahun 2018 investasi internasional GIC mencapai S\$ 467 miliar, ini adalah angka dana kekayaan negara terbesar kedelapan di dunia (GIC, 2014; Tan, 2018).

Internasionalisasi kapital Singapura ini telah menciptakan ruang-ruang baru bagi akumulasi kapital serta mendorong inisiasi kesepakatan/kerja sama ekonomi di kawasan. Salah satu kerja sama simbolis pada periode awal adalah Segitiga Pertumbuhan (*Growth Triangle*), sebuah proyek yang diajukan oleh pemerintah Singapura sejak 1980-an dan secara resmi dimulai pada 1990, melibatkan Indonesia dan Malaysia. Gagasannya adalah bagi negara bagian Johor Malaysia dan Pulau Riau Indonesia untuk bergabung dengan Singapura sebagai sebuah zona spesialisasi komplementer koheren lintas negara (Parsonage, 1992; Smith, 1997). Proyek ini penting bagi Singapura sebab ia menyediakan penyesuaian spasial bagi keterbatasan struktural GLC di dalam negeri—kenaikan upah dan penurunan daya saing sektor-sektor manufaktur bernilai-tambah rendah. Memancanegarkan manufaktur padat karya ke wilayah-wilayah sebelah berupah rendah memungkinkan GLC memulihkan kompetitif internasional mereka (Dent, 2003). Sementara itu, Singapura sendiri melakukan restrukturisasi untuk menjadi tuan rumah bagi MNC non-kawasan yang terlibat dalam produksi padat pengetahuan bernilai lebih tinggi. Contohnya, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Singapura menerima investasi dan operasi dari perusahaan di bidang elektronik bernilai tambah tinggi, petrokimia, dan industri rekayasa. Sehingga pada tahun 1980-an negara ini menjadi produsen *hard disk drive* terkemuka di dunia. Dengan demikian, maraknya investasi FDI dan beroperasinya berbagai MNC dapat mendukung perbaikan industri dalam negeri (Smith, 1997; Yue, 2002). Terlebih penting, perwujudan restrukturisasi ekonomi transnasional Singapura dimungkinkan oleh pergeseran komplementer dari kebijakan-kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap EOI sejak 1980-an, yang mencoba meningkatkan investasi dari MNC dan mengizinkan liberalisasi beberapa industri.

Pemerintah Singapura juga menjadi arsitek utama bagi proyek ekonomi kawasan terkini yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sebuah proyek regionalisme ekonomi

yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh ekonomi/pasar kawasan Asia Tenggara dan menarik lebih banyak investasi asing ke dalam kawasan. Pemerintahan PAP mengajukan rezim pengaturan kawasan ini selama KTT ASEAN kedelapan di Phnom Penh pada November 2002. Penciptaan sebuah pasar kawasan terpadu memberikan skala akumulasi baru yang penting bagi kapital Singapura, sebab negara ini mendorong GLC-nya untuk menjadi pemain regional dan global yang dominan (Tsui-Auch, 2006: 107). Jika Segitiga Pertumbuhan utamanya dikemukakan oleh modal manufaktur Singapura, maka proyek MEA justru mencoba memperkuat posisi baru Singapura sebagai pusat bagi sektor jasa di kawasan Asia Tenggara, khususnya bagi GLC beserta mitra-mitra internasional mereka yang bekerja di bidang bisnis, keuangan, logistik dan distribusi, komunikasi serta informasi. Keunggulan kompetitif Singapura di bidang jasa didukung oleh lokasi strategisnya, infrastruktur fisiknya yang maju dan pembatasan minimalnya bagi pergerakan barang, jasa dan produksi. MEA bertujuan untuk mengurangi hambatan bagi ekspansi sektor-sektor ini di seluruh pasar kawasan.

Tidak mengherankan, para konglomerat Singapura kini menguasai daftar 50 perusahaan papan atas ASEAN, menduduki empat dari lima tempat papan atas pada 2014. Singapore Telecommunications (SingTel) menjadi yang pertama, disusul tiga bank terbesar Singapura: DBS Group Holdings, Oversea-Chinese Banking Corporation dan United Overseas Bank (Nikkei Asia, 2014). Hal ini merupakan bukti atas masifnya ekspansi kapital dari investasi Singapura di pasar ASEAN sejak proyek MEA diprakarsai. Ketika kesepakatan untuk membangun MEA ditandatangani tahun 2003, total OFDI Singapura dari sektor korporat sebesar S\$ 153 miliar, di mana S\$ 34 miliar ditanamkan di ASEAN (Department of Statistics Singapore, 2009). OFDI Singapura meningkat menjadi S\$ 783 miliar pada 2016, hanya satu tahun setelah MEA secara resmi diluncurkan, di mana investasi langsung di negara-negara ASEAN mencakup lebih dari S\$ 119 miliar (Department of Statistics Singapore, 2016).

Indonesia: Internasionalisasi Kapital dan Aliansi Kekuasaan

Sementara dalam kasus Indonesia, rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Suharto (1967-1998) memiliki peran besar dalam membentuk kemunculan kelas kapitalis Indonesia. Pembangunan ekonomi yang dilakukan melalui model negara otoriter dan patrimonialisme memperkuat kelas kapitalis domestik yang sangat terpusat. Meskipun pemerintah mulai mengadopsi kebijakan EOI pada 1980-an, bergeser dari kebijakan

industrialisasi substitusi impor (*import substitution industrialization/ISI*) sebelumnya di tahun 1970-an, hanya sedikit dari kelas kapitalis yang melakukan aktivitas bisnis internasional (Crouch, 1994; Robison, 1986). Namun demikian, dua dasawarsa sejak kejatuhan Suharto kita menyaksikan banyak dari konglomerat Indonesia yang mulai menjelajah pasar regional dan global, mendorong operasi bisnis mereka di luar Indonesia. Melalui aliansi dengan korporasi internasional (MNC) untuk memperkuat bisnis mereka, para kelompok bisnis ini menunjukkan orientasi internasionalisasi kapital yang kuat. Hal ini dicapai melalui investasi besar ke dalam pasar global; pengambilalihan beberapa perusahaan berbasis mancanegara melalui merger, akuisisi, dan usaha patungan; dan melalui peran yang lebih signifikan dalam rantai nilai kawasan. Banyak dari konglomerat Indonesia terus menikmati perlindungan politik di pasar domestik, khususnya di sektor pertanian, di saat yang sama mereka juga mulai mendukung liberalisasi yang lebih luas di tingkat kawasan Asia Tenggara (Al-Fadhat, 2019). Hal ini menggambarkan dengan nyata bagaimana kapital memiliki kepentingan yang absolut untuk mendapatkan keuntungan di atas segala hal lainnya, sehingga membuat perusahaan-perusahaan besar tetap mendukung atau mempengaruhi kebijakan pemerintah yang meskipun terkadang bertentangan selama hal tersebut memberi fasilitas bagi perluasan kepentingan mereka.

Para konglomerat Indonesia menguasai berbagai sektor strategis domestik, seperti perkebunan, otomotif, hingga pertambangan. Pada sektor perkebunan—terutama kertas dan minyak sawit—mereka telah diuntungkan dari konversi kawasan-kawasan luas hutan Indonesia untuk agribisnis, menghasilkan kawasan perkebunan terbesar di seluruh negara Asia Tenggara. Tidak mengherankan, konglomerat paling besar, seperti Djarum, Sinar Mas, Gudang Garam, Salim, Rajawali, Royal Golden Eagle dan Wilmar, melakukan investasi dalam skala besar pada sektor ini. Ekspansi mereka didukung oleh perusahaan induk (*holding company*) mereka yang justru terdaftar di luar negeri, begitu juga dukungan investasi Cina yang dalam beberapa tahun terakhir menggelontorkan modal dalam skala yang fantastis melalui proyek *Belt and Road Initiative* serta *Asian Infrastructure Investment Bank* (Dewi, 2013; Kurniasari et al., 2022). Pada kasus sektor otomotif, konglomerat seperti Astra International dan Indomobil (anak perusahaan Salim) telah membentuk usaha patungan dengan Honda, Toyota, dan Suzuki untuk memproduksi merek-merek ini di Indonesia demi konsumsi dalam dan luar negeri.

Dominasi mereka dalam sektor “tradisional” ini semakin diperkuat dengan adanya tiga sektor baru yang berkembang secara signifikan pada tahun-tahun belakangan, yaitu industri makanan dan agribisnis, sektor jasa (telekomunikasi, perbankan dan lahan yasan), dan infrastruktur. Sebagai contoh, para konglomerat seperti Royal Golden Eagle, Sinar Mas Group dan Salim Group mengukuhkan posisi kuat di sektor makanan dan agribisnis di kawasan Asia-Pasifik dengan mengakuisisi beberapa perusahaan di Singapura, Malaysia, Vietnam, Cina dan Australia (First Pacific, 2015; Golden Agri Resources, 2017; RGE, 2016). Ekspansi kapital di kawasan ini membuat pebisnis besar Indonesia bergerak dari strategi awal mereka memproduksi barang-barang secara domestik, baik untuk konsumsi domestik atau terkadang untuk ekspor, menuju strategi terpadu secara vertikal, mengendalikan seluruh tahapan produksi makanan dalam rantai nilai yang tersebar di seluruh kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara (Al-Fadhat, 2022).

Pada sektor jasa, ekspansi konglomerat Indonesia turut didukung oleh konteks meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan penduduk di kawasan, sekaligus menandai besarnya potensi pasar di kawasan Asia Tenggara (UNCTAD, 2015: 41). Salah satu contoh kunci adalah Lippo Group. Di sektor bisnis *real estate* diantaranya yaitu bisnis tanah beserta bangunan atau apa pun yang ada di atasnya, Lippo melakukan konsolidasi bisnis di bawah naungan Lippo Karawaci—perusahaan properti terbesar di Indonesia—kemudian bekerja sama dengan China Resources Group milik pemerintah Cina dan perusahaan Jepang Mitsubishi Corp. untuk diperluas operasinya di kawasan. Melalui merger dan akuisisi, portofolio bisnis *real estate* Lippo semakin berkembang di beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Singapura, Malaysia dan Vietnam, melanjutkan ekspansi yang telah dilakukan sebelumnya ke Hong Kong, Cina, dan Korea Selatan (Lippo Karawaci, 2008; Lippo Limited, 2016).

Konglomerat Indonesia juga memainkan peran penting dalam ekspansi investasi kawasan di sektor infrastruktur. Hal ini juga seiring dengan banyaknya proyek infrastruktur yang diluncurkan oleh pemerintah negara-negara ASEAN untuk mengatasi isu-isu seperti kemacetan lalu lintas yang sangat mengganggu di beberapa ibu kota, khususnya Manila, Jakarta, dan Bangkok (Koyanagi, 2017). Beberapa proyek infrastruktur di Metro Manila, termasuk pembangkit listrik, pasokan air dan jalan tol, dilaksanakan oleh konglomerat Indonesia, Salim Group, melalui Metro Pacific

Investments Corporation yang merupakan anak perusahaan First Pacific, perusahaan induk milik Salim (First Pacific, 2006).

Penting untuk menyoroti bahwa ekspansi dari fraksi internasional dari borjuasi Indonesia di pasar kawasan ikut membentuk proses internasionalisasi negara (Hameiri & Jones, 2015). Perubahan ini dimungkinkan dan dibentuk oleh relasi kuasa oligarki di bawah rezim Suharto, yang memiliki kepentingan bisnis sangat dominan dan mengakar di dalam institusi-institusi politik dan birokratis. Partai-partai politik besar pasca-Suharto juga dipimpin dan dikendalikan oleh elit-elit bisnis atau setidaknya terafiliasi erat dengan konglomerat. Sebagai contoh, selama tahun 2009-2014, Golkar dipimpin oleh Aburizal Bakrie, ketua dari Bakrie Group; dari 2010-2015, Partai Amanat Nasional dipimpin oleh Hatta Rajasa, yang merupakan pemilik dari Arthindo Group; serta Gerindra yang didirikan pada 2008 oleh Prabowo Subianto, mantan menantu Suharto yang merupakan pengusaha di sektor energi, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan melalui Nusantara Group.

Relasi kuasa antara pebisnis dan pemerintah juga tercermin dalam struktur pemerintahan di kementerian. Beberapa kementerian strategis menjadi kunci bagi kebijakan ekonomi, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (kini Kementerian Investasi/BKPM), memiliki afiliasi erat dengan elit-elit bisnis. Sebagai contoh, sejak tahun 2004, setiap Menteri Perdagangan merupakan bagian dari elit bisnis: Mari Elka Pangestu (Menteri dari 2004 hingga 2011) dan Gita Wirjawan (2011-2014) merupakan salah seorang pendiri Ancora Capital Management (Asia); Muhammad Lutfi (2014, dan ditunjuk kembali tahun 2019-sekarang) merupakan salah seorang pendiri Mahaka Group; Rachmat Gobel (2014-2015) merupakan ketua Panasonic Gobel Group; Thomas Lembong (yang menjabat 2015-2016, sebelum diangkat menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal), merupakan CEO Quvat Capital; dan Enggartiasto Lukita (2016-2019), pengusaha di sektor properti melalui beberapa perusahaan. Terkait Mari Elka Pangestu, terlepas dari latar belakangnya sebagai seorang teknokrat, ia terafiliasi dengan Sofjan Wanandi, ketua Santini Group.

Kendali instrumental yang sangat kuat atas negara ini membuat borjuasi interior Indonesia dapat membentuk dan mengubah kebijakan ekonomi nasional demi mempermudah ekspansi kapital mereka di tingkat kawasan serta memberi jalan bagi

integrasi Indonesia ke dalam ekonomi global. Sebagai contoh, dukungan terhadap ekspansi internasional konglomerat Indonesia ditunjukkan oleh kebijakan “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025” (MP3EI). Salah satu prioritas dari Masterplan ini adalah mempererat pautan operasi para konglomerat dengan lingkaran kapital kawasan, khususnya melalui kebijakan neoliberal integrasi ekonomi ASEAN, khususnya MEA (Coordinating Ministry For Economic Affairs, 2011). MP3EI mencoba meningkatkan arus kapital di seluruh kawasan dengan menerapkan skema ASEAN *Comprehensive Investment Agreement*. Perjanjian ini berupaya memperkuat daya tarik kawasan sebagai tujuan investasi tunggal dengan mengukuhkan rezim investasi bebas, terbuka, transparan dan terpadu bagi investor domestik dan internasional. Perjanjian itu mendukung internasionalisasi fraksi kapital kawasan dengan mempromosikan liberalisasi investasi progresif di seantero kawasan, mengukuhkan kaidah-kaidah non-diskriminasi dan transparansi, melindungi investor dari penyitaan, dan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara. Negara anggota ASEAN dengan begitu didorong untuk mendukung ekspansi korporat, investasi bersama dan jejaring produksi kawasan (ASEAN, 2009).

Malaysia: Internasionalisasi Kapital dan Politik Bumiputera

Peran penting yang dimainkan oleh negara dalam memudahkan internasionalisasi kapital juga ditunjukkan dalam kasus Malaysia. Di sini, prosesnya berakar dari restrukturisasi negara yang dilaksanakan di bawah Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy/NEP*). NEP merupakan kebijakan yang diperkenalkan pada awal 1970-an sebagai tanggapan atas kerusuhan anti-Cina di antara pribumi Melayu (atau Bumiputera), yang membenci dominasi warga etnis Cina atas ekonomi Malaysia yang telah berlangsung cukup lama. NEP dicirikan dengan adanya intervensi kuat negara oleh elit penguasa Melayu, dipimpin oleh *United Malay National Organisation* (UMNO), untuk redistribusi kekayaan yang sebelumnya lebih banyak dikuasai keturunan Cina dan menyuburkan kelas kapitalis Melayu. Seiring waktu, intervensi ini mengukuhkan perusahaan yang dikuasai oleh Bumiputera sebagai perusahaan yang tidak saja semakin besar tetapi juga memiliki kepentingan dan ambisi internasionalisasi mereka, serta aliansi politik yang memungkinkan adanya dukungan kuat negara untuk memuluskan kepentingan ini.

NEP mengukuhkan fraksi kelas kapitalis Melayu dalam beragam cara, termasuk dorongan divestasi oleh perusahaan-perusahaan Barat, kemudahan usaha patungan dengan bisnis-bisnis milik etnis Cina (disebut sebagai kemitraan “Ali-Baba”), dan privatisasi aset-aset negara (Gomez, 2006: 121). Melalui skema privatisasi, para mantan petinggi negara dan birokrat senior diberi posisi di sektor swasta, dan banyak aset privatisasi dijual ke perusahaan-perusahaan yang pemiliknya memiliki afiliasi politik dengan UMNO. Pemerintah juga menggunakan kendalinya atas sektor perbankan untuk mengarahkan kapital kepada perusahaan-perusahaan yang disukai, termasuk penyediaan pinjaman untuk membeli aset-aset negara (Gomez & Jomo, 1997). Alhasil, ekuitas yang dipegang oleh pebisnis Bumiputera dan dana amanah pemerintah (*trust fund*) yang dikelola Bumiputera meningkat dari 2,4% pada 1970 menjadi 20,6% pada 1995 (Gomez, 2006: 121). Dengan demikian, campur tangan dan politik yang dimainkan negara telah mendorong kebangkitan korporasi besar milik etnis Melayu yang mempunyai afiliasi erat dengan elit-elit politik dan birokratis.

Pada pertengahan 1980-an, di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad, negara mulai memudahkan internasionalisasi kapital melalui strategi EOI. Proses ini merupakan bagian dari visi besar Mahathir bagi Malaysia demi meraih status negara maju pada tahun 2020. Hal ini juga didorong oleh kemunculan kaum kapitalis Melayu yang berorientasi internasional, diorganisasi melalui Bumiputera *Commercial and Industrial Community* (BCIC). Mahathir mempromosikan sebuah model “Malaysia Inc.”, berdasarkan pengalaman “Japan Inc.”, di mana intervensi dan rekayasa kebijakan negara akan memajukan industri domestik dan membantu internasionalisasinya (Chee & Gomez, 1994: 357). Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, mengambil model Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Jepang, ditugasi mengendalikan EOI (Gomez, 2009), dan menentukan sektor-sektor industri yang harus melibatkan perusahaan-perusahaan swasta (Webster, 2014).

Salah satu strategi internasionalisasi yang muncul adalah usaha patungan yang dimediasi negara antara kelompok kapitalis lokal dan korporasi asing. Salah satu contoh penting adalah industri berat Malaysia, khususnya *Heavy Industries Corporation of Malaysia* (HICOM). Perusahaan milik negara ini bekerja sama terutama dengan perusahaan-perusahaan Jepang untuk membangun sejumlah industri, merentang dari produksi baja, besi dan semen sampai pembuatan mobil (Gomez, 2009). Di sektor

otomotif, pemerintah memimpin perundingan dengan perusahaan Jepang Mitsubishi untuk mendirikan usaha bersama Perusahaan Otomobil Nasional (Proton), perusahaan mobil nasional Malaysia, dengan HICOM memegang kepentingan pengendali. Edaran Otomobil Nasional didirikan oleh HICOM pada 1985 untuk menangani penjualan salah satu produk Proton. Menyusul perselisihan antara pemerintah Malaysia dan Mitsubishi mengenai transfer teknologi, usaha patungan lain selanjutnya dibentuk bersama Daihatsu Jepang, dan proyek mobil nasional kedua Malaysia diperkenalkan melalui usaha patungan yang lain, Perusahaan Otomobil Kedua (Perodua), antara Mitsui Jepang dan perusahaan lokal United Motor Works, yang juga di bawah kendali negara (Gomez, 2009: 358). Mahathir juga mendorong para konglomerat agar mendirikan usaha-usaha patungan dengan pabrikan Eropa untuk memproduksi model-model baru mobil nasional. Satu proyek melibatkan PSA Peugeot Citroën Prancis dan secara publik terdaftar Diversified Resources, dikendalikan oleh politisi UMNO, Yahaya Ahmad (Gomez, 2009).

Pada awal 1990-an, Mahathir menyadari pentingnya arus kapital dan investasi Cina untuk mendukung akselerasi industrialisasi negeri jiran ini. Ketika Cina membuka ekonominya, Mahathir melihat hal ini sebagai potensi yang dapat menguntungkan ekonomi Malaysia. Hal ini mengarah kepada kebijakan liberalisasi ekonomi baru yang menyertakan kapital Cina dalam rencana pembangunan Malaysia (Gomez, 2009: 361). Strategi Mahathir adalah untuk mendorong kerja sama bisnis yang lebih besar antara pengusaha Cina dan Melayu demi memperkuat industri Malaysia sebagaimana juga melakukan ekspansi ke pasar Cina—sesuatu yang tidak terjadi sebelumnya menyusul strategi NEP. Karena itu, memasuki pasar Cina yang luar biasa besar merupakan sarana dan strategi yang dilakukan negara untuk memperkuat internasionalisasi kapital konglomerat Bumiputera (Gomez, 2009: 362).

Pemerintah Malaysia juga mendorong adanya integrasi ekonomi kawasan demi menciptakan arena baru bagi akumulasi kapital perusahaan yang dimiliki pengusaha etnis Melayu. Pada tahun 1990, sebelum Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*) dikukuhkan, Mahathir mengajukan blok perdagangan bebas kawasan bernama Kaukus Ekonomi Asia Timur (*East Asia Economic Caucus/EAEC*), yang mencakup negara anggota ASEAN, Jepang, Cina dan Korea Selatan (Akrasane & Stifel, 1992: 44). EAEC dipandang sebagai pengimbang blok ekonomi kawasan yang baru disepakati di kawasan Eropa dan Amerika Utara, sekaligus menandai hasrat perusahaan-

perusahaan Malaysia untuk mengakses pasar kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur yang lebih luas.

Dalam sejarahnya, EAEC tidak pernah secara resmi dibentuk, sebagai imbas dari keengganan Jepang dan penentangan kuat dari AS dan Australia. Namun demikian, pembentukan forum ASEAN Plus Three setelah krisis finansial Asia, yang merupakan kerja sama ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN dengan Cina, Jepang, dan Korea Selatan, merupakan bentuk lebih longgar dari visi Mahathir tersebut. Di sela-sela itu, Malaysia mengubah perhatiannya dan memfokuskan pada AFTA. Kebijakan pemerintah di sini menggambarkan betapa eratnya praktik kekuasaan negara mencerminkan kepentingan fraksi kelas kapital: di mana liberalisasi perdagangan akan memberi keuntungan bagi pebisnis Malaysia, karena itu pemerintah sangat mendukung instrumen-instrumen kerja sama AFTA beserta penerapannya, meskipun keraguan tetap muncul bahwa liberalisasi akan mengancam bisnis Bumiputera, seperti sektor otomotif, misalnya (Athukorala, 2003; Nesadurai, 2003).

Adanya restrukturisasi ekonomi setelah krisis finansial Asia memperlihatkan semakin banyaknya konglomerat Malaysia yang mencoba mereorganisasi bisnis mereka, sehingga dapat melakukan ekspansi pada skala internasional. Hal ini memacu transformasi lebih jauh dari struktur negara Malaysia yang diejawantahkan ke dalam dukungan kuat bagi proyek liberalisasi ekonomi kawasan melalui MEA (Lee, 2014; Tan, 2015). Salah satu faktor utama yang mendorong hal ini adalah upaya untuk mengurangi hambatan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan Malaysia yang ingin mengakses pasar kawasan (Alavi, 2014: 231). Pada sektor perbankan, misalnya, dua bank terbesar Malaysia, Maybank dan CIMB Group, kini merupakan bagian dari bank terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2014, keduanya berada pada peringkat 25 perusahaan papan atas ASEAN berdasarkan kapitalisasi pasar (Nikkei Asia, 2014). Menurut Nazir Razak, kepala CIMB Group, terbukanya pasar kawasan memungkinkan CIMB untuk memperkuat operasi bisnisnya di bidang perdagangan dan investasi kapital di internal pasar ASEAN (Razak, 2016; Tan, 2016).

Simpulan

Studi mengenai transformasi dari fraksi kapital atau peran dari konglomerat tidak banyak mendapatkan perhatian dalam studi hubungan internasional, baik studi empiris maupun teoretis. Di antara kelompok literatur yang fokus pada diskursus ini adalah Mazhab

Murdoch yang memberi penekanan pada analisis proses terbentuknya kelas kapitalis hingga kemunculannya sebagai aktor politik yang sangat penting. Artikel ini mengembangkan konsepsi teoritis dari Mazhab Murdoch dan Mazhab Amsterdam dengan menganalisis perubahan sifat dari kelas kapitalis di Asia Tenggara, melalui proses internasionalisasi kapital yang mulai terjadi secara gradual sejak tahun 1990-an akhir, terutama pasca krisis finansial Asia, sehingga membentuk model pembangunan ekonomi yang sangat khas, yaitu *regulatory capitalism* (kapitalisme regulasi). Model ini merupakan bentuk akumulasi dan ekspansi ekonomi yang diatur dan dikondisikan melalui hubungan kekuasaan antara fraksi kapital dan negara.

Studi dalam artikel ini sekaligus mengelaborasi diskursus dalam Mazhab Amsterdam, yang memusatkan perhatian pada pembentukan fraksi kelas kapitalis transnasional, beserta dampaknya terhadap pembentukan tatanan kekuasaan melalui aliansi ekonomi dan politik di dalam struktur negara (Jessop & Overbeek, 2019; Overbeek, 2004; van Apeldoorn, 2004). Meskipun Mazhab Amsterdam banyak mengelaborasi studi atas fraksi kapital di Eropa, terdapat bukti yang kuat akan kecenderungan yang serupa terjadi di Asia Tenggara. Tradisi Mazhab Murdoch memberikan analisis mengenai pembangunan borjuasi interior dalam kondisi ekonomi politik yang sangat spesifik di Asia Tenggara, yang dapat menjelaskan bentuk-bentuk transformasi negara yang kita saksikan sebagai bagian dari internasionalisasi kapital yang sejak awal mendapatkan perlindungan dan dukungan dalam struktur politik domestik.

Mengembangkan tradisi kedua Mazhab ini, artikel ini telah menjelaskan bagaimana transformasi kontemporer dari kelas kapitalis Asia Tenggara ikut berperan dalam merestrukturisasi bentuk dan fungsi kekuasaan negara. Secara khusus, artikel ini memberikan gambaran jelas bagaimana telah terjadi pergeseran kuat dari yang awalnya konsolidasi borjuasi berorientasi nasional melalui berbagai kebijakan statis negara pada 1970-an dan 1980-an hingga kemunculan fraksi kapital berorientasi internasional, khususnya setelah krisis finansial Asia, serta adanya kemudahan dalam proses ekspansi kapital dalam skala transnasional melalui serangkaian kebijakan negara.

Daftar Pustaka

Akrasanee, N., & Stifel, D. (1992). The Political Economy of the ASEAN Free Trade Area. In P. Imada & S. Naya (Eds.), *ASEAN: The Way Ahead* (pp. 27-47). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

- Al-Fadhat, F. (2019). *The Rise of International Capital: Indonesian Conglomerates in ASEAN*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Al-Fadhat, F. (2022). Big Business Capital Expansion and the Shift of Indonesia's Global Economic Policy Outlook. *East Asia*, 39(4): 389-406. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12140-022-09384-3>
- Alavi, R. (2014). Malaysia's Participation in the ASEAN Economic Community. In S. Basu Das & L. P. Onn (Eds.), *Malaysia's Socio-Economic Transformation: Ideas for the Next Decade* (pp. 227-260). Singapore: ISEAS Publishing.
- ASEAN. (2009). *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN. (2019). *ASEAN Investment Report 2016: FDI in Services: Focus on Health Care*. Jakarta: ASEAN Secretariat & UNCTAD.
- Asia Times. (2002). Singapore's regionalization challenge. *Asia Times*, 27 July.
- Athukorala, P.-c. (2003). *Crisis and Recovery in Malaysia: The Role of Capital Controls*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Bieler, A., & Morton, A. D. (2014). The Will-O'-the-Wisp of the Transnational State. *Journal of Australian Political Economy*, 72, 23-51.
- Boswell, T., & Chase-Dunn, C. K. (2000). *The Spiral of Capitalism and Socialism: Toward Global Democracy*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Carroll, T. (2020). The Political Economy of Southeast Asia's Development from Independence to Hyperglobalisation. In T. Carroll, S. Hameiri, & L. Jones (Eds.), *The Political Economy of Southeast Asia: Politics and Uneven Development under Hyperglobalisation* (4 ed., pp. 35-84). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Carroll, T., Hameiri, S., & Jones, L. (Eds.) (2020) *The Political Economy of Southeast Asia: Politics and Uneven Development under Hyperglobalisation*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Carroll, T., Gonzalez-Vicente, R., & Jarvis, D. S. L. (2019). Capital, conflict and convergence: a political understanding of neoliberalism and its relationship to capitalist transformation. *Globalizations*, 16(6), 778-803. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14747731.2018.1560183>
- Chee, P. L., & Gomez, E. T. (1994). Malaysian Sogoshoshas: Superficial Cloning, Failed Emulation. In K. S. Jomo (Ed.), *Japan and Malaysian Development: In the Shadow of the Rising Sun* (pp. 232-243). London: Routledge.
- Coordinating Ministry For Economic Affairs. (2011). *Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development*. Jakarta: Coordinating Ministry For Economic Affairs.
- Crouch, H. (1994). Indonesia: An Uncertain Outlook. *Southeast Asian Affairs*, 21(1), 121-145.
- Dent, C. M. (2003). Transnational Capital, the State and Foreign Economic Policy: Singapore, South Korea and Taiwan. *Review of International Political Economy*, 10(2), 246-277. <https://doi.org/10.1080/0969229032000063225>
- Departement of Statistics Singapore. (2009). *Singapore's investment abroad 2007*. Singapore: Department of Statistics, Ministry of Trade and Industry.
- Departement of Statistics Singapore. (2016). *Singapore's direct investment abroad 2016*. Singapore: Department of Statistics, Ministry of Trade and Industry.
- Dewi, O. (2013). Reconciling Development, Conservation, and Social Justice in West Kalimantan. In O. Pye & J. Bhattacharya (Eds.), *The Palm Oil Controversy in*

- Southeast Asia: A Transnational Perspective* (pp. 164-178). Singapore: ISEAS Publishing.
- First Pacific. (2006). *Annual Report 2006*. Hong Kong: First Pacific Company Limited. Available from: http://www.firstpacific.com/wp-content/uploads/2015/08/3497_ear2006.pdf, accessed 19 October 2021.
- First Pacific. (2015). *Annual Report 2015: Creating Long-term Value in Asia*. Hong Kong: First Pacific Company Limited. Available at: <http://www.firstpacific.com/wp-content/uploads/2015/08/First-Pacific-2015-Annual-Report.pdf>. Accessed 15 March 2021.
- GIC [Government of Singapore Investment Corporation]. (2014). *GIC: Report on the Management of the Government's Portfolio for the Year 2013/14*. Singapore: GIC.
- Glassman, J. (1999). State power beyond the 'territorial trap': the internationalization of the state. *Political Geography*, 18(6), 669-696. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0962-6298\(99\)00013-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0962-6298(99)00013-X)
- Golden Agri Resources. (2017). *Annual Report 2017: Responsible Growth Through Innovation*. Golden Agri Resources Ltd.
- Gomez, E. T. (2006). Malaysian Business Groups: The State and Capital Development in the Post-Currency Crisis Period. In S.-J. Chang (Ed.), *Business Groups in East Asia: Financial Crisis, Restructuring, and New Growth* (pp. 119-146). Oxford: Oxford University Press.
- Gomez, E. T. (2009). The Rise and Fall of Capital: Corporate Malaysia in Historical Perspective. *Journal of Contemporary Asia*, 39(3), 345-381. <https://doi.org/10.1080/00472330902944404>
- Gomez, E. T., & Jomo, K. S. (1997). *Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage and Profits*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hameiri, S., & Jones, L. (2015). Global Governance as State Transformation. *Political Studies*, 64(4), 793-810. <http://dx.doi.org/10.1111/1467-9248.12225>
- Hewison, K. (1989). *Bankers and Bureaucrats: Capital and the Role of the State in Thailand*. Yale University Press.
- Hewison, K. (2021). Crazy Rich Thais: Thailand's Capitalist Class, 1980–2019. *Journal of Contemporary Asia*, 51(2), 262-277.
- Hill, H. (Ed.). (2002). *The Economic Development of Southeast Asia*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Huat, C. B. (1997). *Political Legitimacy and Housing: Stakeholding in Singapore*. Abingdon: Routledge.
- Huat, C. B. (2016). State-owned enterprises, state capitalism and social distribution in Singapore. *The Pacific Review*, 29(4), 499-521. <https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1022587>
- IE Singapore. (2016). *Annual Report 2015/2016: The Multiplier Effect*. Singapore: International Enterprise Singapore.
- Jessop, B. (2015). Crises, crisis-management and state restructuring: what future for the state? *Policy & Politics*, 43(4), 475-492. <https://doi.org/10.1332/030557314X14156337971988>
- Jessop, B., & Overbeek, H. (Eds.). (2019). *Transnational Capital and Class Fractions: The Amsterdam School Perspective Reconsidered*. New York: Routledge.
- Jones, M. R. (1997). Spatial Selectivity of the State? The Regulationist Enigma and Local Struggles over Economic Governance. *Environment and Planning A*, 29(5), 831-864. <https://doi.org/10.1068/a290831>

- Koyanagi, K. (2017). Emerging Asian economies race to build metros amid choking congestion. *Nikkei Asia*, November 22. Available from: <https://asia.nikkei.com/magazine/20171123/On-the-Cover/Emerging-Asian-economies-race-to-build-metros-amid-choking-congestion>. Accessed 20 March 2021.
- Kurniasari, E., Virginita, A., & Yeremia, A. E. (2022). China's Perspectives on Multilateralism: A Preliminary Exploration of The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). *Intermestic: Journal of International Studies*, 6(2), 442-458.
- Lee, L. (2014). Malaysia more receptive to Asean Economic Community. *The Star Online*, August 21. Available at: <http://www.thestar.com.my/business/business-news/2014/08/21/malaysia-more-ready-than-neighbours-for-asean-economic-community/>. Accessed 19 June 2021.
- Leung, K. K., & Chan, R. K. H. (Eds.). (2002). *Development in Southeast Asia: Review and Prospects*. London: Routledge.
- Levi-Faur, D. (2017). Regulatory capitalism. In P. Drahos (Ed.), *Regulatory Theory: Foundations and applications* (pp. 289-302). Canberra, Australia: ANU Press.
- Lippo Karawaci. (2008). *Annual Report 2008: Towards Global Excellence*. Jakarta: PT Lippo Karawaci Tbk. Available at: https://www.lippokarawaci.co.id/uploads/file/Publication/AnnualReport/AnnualReport2008_EN.pdf. Accessed 22 June 2021.
- Lippo Limited. (2016). *Annual Report 2015/2016*. Hong Kong: Lippo Limited. Available at: http://www.lippoltd.com.hk/financial_en.asp. Accessed 22 June 2021.
- MacLeod, G., & Goodwin, M. (1999). Reconstructing an urban and regional political economy: on the state, politics, scale, and explanation. *Political Geography*, 18(6), 697-730. [https://doi.org/10.1016/S0962-6298\(99\)00014-1](https://doi.org/10.1016/S0962-6298(99)00014-1)
- Marx, K., & Engels, F. (1965 [1848]). Manifesto of the Communist Party. In K. Marx & F. Engels (Eds.), *Selected Works* (pp. 35-63). New York: International Publishers.
- Nesadurai, H. E. S. (2003). *Globalisation, Domestic Politics and Regionalism: The ASEAN Free Trade Area*. London: Routledge.
- Nikkei Asia. (2014). The region's top companies: ASEAN 100. November 20. Available at: <https://asia.nikkei.com/magazine/20141120-THE-REGION-S-TOP-COMPANIES/Cover-Story/The-regions-top-companies-ASEAN-100>. Accessed 20 March 2022.
- Okposin, S. B. (1999). *The Extent of Singapore's Investments Abroad*. Aldershot, UK: Ashgate Publishers.
- Overbeek, H. (2004). Transnational class formation and concepts of control: towards a genealogy of the Amsterdam Project in international political economy [journal article]. *Journal of International Relations and Development*, 7(2), 113-141. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800011>
- Palloix, C. (1977). The Self-Expansion of Capital on a World Scale. *Review of Radical Political Economics*, 9(2), 3-17.
- Panitch, L., & Gindin, S. (2004). Global Capitalism and American Empire. In C. Leys & L. Panitch (Eds.), *Socialist Register 2004: The New Imperial Challenge* (Vol. 40, pp. 1-42). London: Merlin Press.
- Parsonage, J. (1992). Southeast Asia's 'Growth Triangle': a subregional response to global transformation. *International Journal of Urban and Regional Research*, 16(2), 307-317. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1992.tb00174.x>

- Poulantzas, N. (1974). Internationalisation of Capitalist Relations and the Nation-State. *Economy and Society*, 3(2), 145-179. <https://doi.org/10.1080/03085147400000008>
- Poulantzas, N. (1978). *State, Power and Socialism*. New Left Books.
- Razak, N. D. S. (2016). ASEAN Economic Community in 2025. In *Asia 2025* (pp. 37-40). London: Asia House.
- RGE [Royal Golden Eagle]. (2016). *Our History: From Local to Global*. Singapore: Royal Golden Eagle. Available at: <http://www.rgei.com/about/our-history>. Accessed 18 March 2021.
- Robinson, W. (2007). The Pitfalls of Realist Analysis of Global Capitalism: A Critique of Ellen Meiksins Wood's Empire of Capital. *Historical Materialism*, 15(3), 71-93. <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.1163/156920607X225889>
- Robison, R. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney: Allen and Unwin.
- Rodan, G. (1989). *The Political Economy of Singapore's Industrialization: National State and International Capital*. Basingstoke: Macmillan.
- Rodan, G. (2006). Singapore: Globalisation, the State, and Politics. In G. Rodan, K. Hewison, & R. Robison (Eds.), *The Political Economy of South-East Asia: Markets, Power, and Contestation* (pp. 137-169). Melbourne: Oxford University Press.
- Rodan, G. (2016). Capitalism, Inequality and Ideology in Singapore: New Challenges for the Ruling Party. *Asian Studies Review*, 40(2), 211-230. <https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1155536>
- Rodan, G., Hewison, K., & Robison, R. (Eds.). (2006). *The Political Economy of South-East Asia: Markets, Power and Contestation* (3 ed.). Melbourne: Oxford University Press.
- Sato, Y. (2019). Reemerging Developmental State in Democratized Indonesia. In Y. Takagi, V. Kanchoochat, & T. Sonobe (Eds.), *Developmental State Building: The Politics of Emerging Economies* (pp. 69-96). Singapore: Springer.
- Sklair, L. (2001). *The Transnational Capitalist Class*. Blackwell.
- Smith, S. L. D. (1997). The Indonesia-Malaysia-Singapore growth triangle: A political and economic equation. *Australian Journal of International Affairs*, 51(3), 369-382. <https://doi.org/10.1080/10357719708445224>
- Tan, A. (2018). GIC 20-year returns ease to 3.4% amid challenging climate. *The Business Times*, July 13. Available at: <https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/gic-20-year-returns-ease-to-34-amid-challenging-climate>. Accessed 10 Mar 2022.
- Tan, C. (2015). Malaysia gears up to declare regional integration. *Nikkei Asia*, November 18. Available at: <http://asia.nikkei.com/Business/Companies/IndonesianconglomeratefacilitatingJapaneselistings>. Accessed 19 June 2021.
- Tan, C. (2016). CIMB chief calls on the private sector to move integration forward. *Nikkei Asia*, September 1. Available at: <http://asia.nikkei.com/magazine/20160901-ASEAN-THE-GREAT-PUZZLE/On-the-Cover/CIMB-chief-calls-on-the-private-sector-to-move-integration-forward>. Accessed 19 June 2021.
- Temasek Holdings. (2014). *Temasek Review 2014*. Singapore: Temasek Holdings.
- Tremewan, C. (1994). *The political economy of social control in Singapore*. Basingstoke: Macmillan Press.

- Tsoukalas, K. (1999). Globalisation and the Executive Committee: Reflections on the Contemporary Capitalist State. In L. Panitch & C. Leys (Eds.), *Socialist Register 1999: Global Capitalism Versus Democracy* (pp. 56-75). Merlin Press.
- Tsui-Auch, L. S. (2006). Singaporean Business Groups: The Role of the State and Capital in Singapore Inc. In S.-J. Chang (Ed.), *Business Groups in East Asia: Financial Crisis, Restructuring, and New Growth* (pp. 94-115). New York: Oxford University Press.
- UNCTAD. (2015). *World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance*. Geneva: United Nations Publication.
- UNCTAD. (2021). Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual. UNCTADStat Database. Available from: <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx>. Accessed 20 December 2021.
- van Apeldoorn, B. (2004). Theorizing the transnational: a historical materialist approach [journal article]. *Journal of International Relations and Development*, 7(2), 142-176. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800010>
- Webster, T. J. (2014). Malaysian Economic Development, Leading Industries and Industrial Clusters. *The Singapore Economic Review*, 59(5), 1-19. <https://doi.org/10.1142/S0217590814500441>
- Wissel, J. (2006). The Transnationalization of the Bourgeoisie and the New Networks of Power. In A. Gallas, L. Bretthauer, J. Kannankulam, & I. Stütze (Eds.), *Reading Poulantzas* (pp. 216-230). Merlin Press.
- Wong, P. K., & Ng, C. Y. (1997). Singapore's Industrial Policy to the Year 2000. In S. Masuyama, D. Vandenbrink, & C. S. Yue (Eds.), *Industrial Policies in East Asia* (pp. 121-141). Singapore and Tokyo: Institute of Southeast Asian Studies and Nomura Research Institute.
- Yahya, F. (2005). State Capitalism and Government Linked Companies. *Journal of Asia-Pacific Business*, 6(1), 3-31. https://doi.org/10.1300/J098v06n01_02
- Yue, C. S. (2002). Singapore: Destination for Multinationals. In J. H. Dunning (Ed.), *Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy Get access Arrow* (pp. 364-380). Oxford: Oxford University Press.